

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Mawardi Al- Bashri Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Mesir: Darul Hadits, 2006.
- Al-Maududi Mawlana Abul A'la, *Human Right in Islam*, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmaja, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Anies, *Seluk-Beluk Corona Virus*, Jogjakarta: Arruzz Media, 2021.
- Badria Nur Risqiani, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Denpasar: Prenadamedia, 2018.
- Dzajuli, *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-VI, 2017.
- Kania Dede, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq Sayyid, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo: Beirut Publishing, 2018.
- Syafe'i Zakaria, *Negara Dalam Perspektif Islam* Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syafe'i Zakaria, Dosen Pembimbing Skripsi, Bimbingan dengan penulis di rumahnya, tanggal 22 Januari 2022.
- Sudrajat Tedi, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-I, 2020.

- Swaesti Eista, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, Yogyakarta: Javalitera, 2021.
- Triwulan Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia, Cetakan ke-3, 2015.
- Taimiyah Ibnu, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, penerjemah: Arif Maftuhin Dzohir, *Tugas Negara menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-I, 2004.
- Taimiyah Ibnu, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Islahir Raa'i war Ra'iyah*, Penerjemah: Rofi' Munawwar,
- Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1955.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-I, 2020.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2005.
- Wasito, Hastari Wuryastuti, *CORONA VIRUS*, Yogyakarta: Ed. I, Cetakan I: 2020.
- Wahyuni Trisanti, *Corona Virus*, Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020.
- Yahya Zakariya Abu Al-Imam bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, Surabaya: Imarotullah.
- Adliya, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, juni 2020.
- Affandi Hernadi, *Implementasi Hak atas Kesehatan*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Akbar Rizqi Muhammad, *Respons Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, Vol. 2 No. 2 2020.

Fathammubina Rohendra and Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3, No. 1 2018.

Febiana Nadia, *Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Covid-19*, Jurnal Translitera, Vol. 10 No. 2 2021.

Muhshi Adam, *Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik*, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5 Issue 1 2018

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, No. 6 2011.

Sujatmoko Emmanuel, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 1 2010.

Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah ibn Taimiyah*, Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2 2015.

Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vius Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 Nomor 91.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan (corona virus disease 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020.

Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

Sumber dari situs dan media online:

<https://www.kompas.com;>

<https://www.liputan6.com;>

<http://Sindonews.com;>

<http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19.>